PERAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERTUMBUHAN UMKM DI DISTRIK ARSO KABUPATEN KEEROM

Abraham Saneraro Jakobus Rumbiak
NPP. 33.1072
Program Studi Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: abrahamrumron@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Jojo Juhaeni, M.M.,
Email: juhaenijojo@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *This study is motivated by the suboptimal role of the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (SMEs) in creating a conducive business environment for the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Arso District, Keerom Regency. This condition is characterized by limited access to capital, low quality of human resources, restricted market access, and the lack of optimal business assistance.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the role of the Department of Cooperatives and SMEs based on the perspective of Institutional Governance Theory, as well as to examine the implementation of programs and strategies in overcoming obstacles to MSME development.* ***Method:*** *This study employs a descriptive qualitative approach with an inductive method. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation involving informants from local government, MSME actors, community leaders, and business facilitators. Data analysis is conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.* ***Result:*** *The results show that the participation of MSME actors remains limited, institutional capacity is not yet optimal, collaboration among stakeholders is still weak, and policy sustainability has not produced significant impacts. The implementation of training, mentoring, and empowerment programs has been carried out, but has not yet reached all business actors evenly. The strategies implemented include improving human resource quality, expanding access to capital and markets, and strengthening institutional capacity, but have not been fully effective.* ***Conclusion:*** *Strengthening institutional capacity, enhancing sustainable mentoring, and developing integrated collaboration are required to create a conducive business environment and improve the competitiveness of MSMEs.*
Keywords: *MSMEs, empowerment, institutional capacity, policy, Keerom*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Kondisi tersebut ditandai dengan keterbatasan akses permodalan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya akses pasar, serta belum optimalnya pendampingan usaha. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Keerom dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM di Distrik Arso berdasarkan perspektif Institutional Governance Theory. **Metode:** Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan informan dari pemerintah daerah, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, serta pendamping usaha. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pelaku UMKM masih terbatas, kapasitas kelembagaan belum optimal, kolaborasi antar pihak masih lemah, serta keberlanjutan kebijakan belum memberikan dampak signifikan. Implementasi program pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan telah dilaksanakan, namun belum menjangkau seluruh pelaku usaha secara merata. Strategi yang dilakukan meliputi peningkatan kualitas SDM, akses permodalan, akses pasar, serta penguatan kelembagaan, namun belum sepenuhnya efektif. **Kesimpulan:** Diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan pendampingan berkelanjutan, serta kolaborasi yang terintegrasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan daya saing UMKM.
Kata kunci: UMKM, pemberdayaan, kelembagaan, kebijakan, Keerom

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pemerintah memiliki mandat konstitusional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan pemberdayaan seluruh potensi bangsa, termasuk sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya lokal (Hatta, 2015). Dalam pembangunan ekonomi nasional, UMKM berperan penting dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat karena mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan nilai tambah ekonomi, dan mendorong pemerataan pembangunan (Tambunan, 2019). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2023), UMKM mencapai 65,4 juta unit usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional.

Selain berperan sebagai penggerak ekonomi, UMKM juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan, dalam meningkatkan pendapatan keluarga dan kemandirian ekonomi. Pemberdayaan UMKM yang inklusif dapat memperluas kesempatan kerja dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga (Marthalina, 2018). Kabupaten Keerom memiliki potensi ekonomi yang besar di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan jasa. Namun, kontribusi UMKM terhadap PDRB Kabupaten Keerom masih sebesar 37,5%, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi yang mencapai 52,3% (BPS, 2023). Selain itu, kontribusi UMKM terhadap PDRB daerah cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir meskipun nilai tambah aktivitas UMKM meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi daerah belum dioptimalkan secara maksimal dan diperlukan strategi pembinaan serta pemberdayaan yang lebih efektif.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinas KUKM) memiliki peran strategis dalam pembinaan kelembagaan koperasi, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses pembiayaan, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Penciptaan iklim usaha yang kondusif dilakukan melalui penyederhanaan regulasi, penguatan akses modal, dan peningkatan daya saing pelaku usaha (Permenkop UKM No. 6 Tahun 2020). Peran pemerintah daerah sangat penting sebagai fasilitator yang menghubungkan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga program pemberdayaan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesempatan kerja dan penguatan ekonomi lokal (Sitompul, 2023). Kondisi di Distrik Arso menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM belum optimal. Tercatat terdapat 647 UMKM aktif, namun sebagian besar masih berada pada skala usaha mikro dengan tingkat pendapatan rendah dan kemampuan ekspansi yang terbatas (Dinas KUKM Kabupaten Keerom,

2024). Permasalahan yang dihadapi meliputi keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya kemampuan manajerial, serta keterbatasan infrastruktur pendukung distribusi barang.

Meskipun Dinas KUKM telah melaksanakan berbagai program seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan modal produktif, pendampingan manajemen usaha, digitalisasi pemasaran, dan penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan jumlah UMKM belum diikuti peningkatan kualitas usaha secara signifikan. Jumlah UMKM di Distrik Arso terus meningkat dan berkontribusi sekitar 35–36% terhadap total UMKM Kabupaten Keerom, namun kapasitas, inovasi, dan daya saing usaha masih rendah (BPS Kabupaten Keerom, 2023). Permasalahan tersebut diperparah oleh keterbatasan infrastruktur dan akses ekonomi. Sebagian wilayah Distrik Arso masih menghadapi kondisi jalan yang rusak, akses internet yang belum merata, keterbatasan pasar permanen, dan transportasi yang belum memadai. Akibatnya, pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memperluas pemasaran, distribusi barang, dan pemanfaatan teknologi informasi. Rendahnya literasi keuangan dan digital juga menyebabkan pelaku UMKM sulit beradaptasi dengan transformasi digital (Purba dkk., 2022).

Dalam konteks pembangunan daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan melalui penyediaan regulasi yang mendukung, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta penguatan akses pasar dan pembiayaan (Toyo, Nazwin, & Setiawan, 2024). Seiring perkembangan ekonomi digital, pemanfaatan teknologi dan keuangan inklusif digital juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan UMKM karena mampu memperluas akses pembiayaan, meningkatkan efisiensi usaha, dan memperkuat daya saing pelaku usaha kecil (Zhang, Dong, Wang, & Li, 2025).

Secara konseptual, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator dalam penguatan kapasitas pelaku usaha lokal (Ndraha, 2018). Namun, implementasi peran tersebut belum optimal akibat keterbatasan sumber daya kelembagaan dan koordinasi antarinstansi. Selain itu, masih terdapat kesenjangan penelitian (contextual gap, knowledge gap, dan methodological gap) terkait peran Dinas KUKM dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, khususnya di wilayah perbatasan seperti Distrik Arso (Rahmawati, 2020; Sitorus, 2021). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Keerom dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM di Distrik Arso, Kabupaten Keerom.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Keerom dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM di Distrik Arso. Meskipun jumlah UMKM terus mengalami peningkatan setiap tahun, kondisi tersebut belum diikuti dengan peningkatan kualitas usaha, daya saing, maupun kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya literasi digital, serta keterbatasan infrastruktur dan akses pasar. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan pemberdayaan UMKM yang diharapkan pemerintah dengan realitas implementasi program di lapangan. Selain itu, konsep peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Ndraha (2018) belum sepenuhnya terwujud dalam konteks pengembangan UMKM di wilayah perbatasan seperti Distrik

Arso. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi pelaku UMKM masih terbatas, kapasitas kelembagaan belum optimal, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan belum berjalan secara efektif sehingga belum mampu menciptakan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

Kesenjangan penelitian (research gap) dalam studi ini terletak pada aspek konteks, pengetahuan, dan metode penelitian. Penelitian terdahulu umumnya dilakukan di wilayah perkotaan atau daerah yang memiliki infrastruktur ekonomi lebih maju, sehingga belum banyak mengkaji efektivitas peran Dinas KUKM pada daerah perbatasan yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda. Hal ini menimbulkan contextual gap sebagaimana dijelaskan oleh Sitorus (2021). Selain itu, penelitian sebelumnya lebih banyak menilai keberhasilan Dinas KUKM berdasarkan jumlah program atau bantuan yang diberikan, bukan pada perubahan kualitas ekosistem usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM, sehingga menimbulkan knowledge gap (Rahmawati, 2020). Sejalan dengan pandangan Gibb dan Li (2003), keberhasilan pengembangan UMKM tidak hanya ditentukan oleh dukungan kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh terciptanya lingkungan kewirausahaan yang mampu mendorong inovasi, pembelajaran, dan penguatan kapasitas usaha secara berkelanjutan. Lebih lanjut, Zhang, Jin, dan Li (2025) menegaskan bahwa inklusi keuangan digital berpengaruh positif terhadap pengembangan UMKM berkualitas melalui perluasan akses pembiayaan dan peningkatan efisiensi usaha, sedangkan Zhang, Mi, Li, dan Wang (2025) menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan. Namun, aspek digitalisasi keuangan dan kolaborasi kelembagaan tersebut masih belum banyak dikaji dalam konteks UMKM di daerah perbatasan seperti Distrik Arso. Dari sisi metodologi, mayoritas penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, sementara kajian kualitatif yang menggali secara mendalam pengalaman dan hambatan pelaku UMKM masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam peran Dinas KUKM Kabupaten Keerom dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM di Distrik Arso melalui pendekatan kualitatif dan perspektif kelembagaan.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting mengingat peran UMKM sebagai penggerak utama perekonomian masyarakat di Distrik Arso Kabupaten Keerom belum didukung oleh iklim usaha yang kondusif, yang ditandai dengan keterbatasan akses permodalan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya akses pasar, lemahnya pemanfaatan teknologi digital, serta belum optimalnya pendampingan dan pemberdayaan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan jumlah UMKM belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diperlukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas peran Dinas Koperasi dan UKM dalam menciptakan lingkungan usaha yang mendukung perkembangan UMKM serta merumuskan strategi perbaikan yang tepat bagi pemerintah daerah. Apabila permasalahan ini tidak segera dikaji dan ditangani, maka potensi ekonomi lokal berisiko tidak berkembang secara optimal, daya saing UMKM akan semakin tertinggal, peluang penciptaan lapangan kerja menjadi terbatas, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten Keerom akan sulit tercapai secara berkelanjutan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji peran pemerintah daerah dan Dinas Koperasi serta Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam pemberdayaan UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020) menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dan UKM melalui program pelatihan, pendampingan usaha, dan fasilitasi akses permodalan mampu meningkatkan kapasitas serta produktivitas pelaku UMKM. Sejalan dengan itu, Siregar (2021) menemukan bahwa dukungan pemerintah daerah dalam bentuk pembinaan dan penguatan kelembagaan usaha memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM, khususnya dalam meningkatkan kemampuan manajerial dan daya saing usaha. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh Maksum, Rachdyu, dan Kusumawardhani (2020) yang menjelaskan bahwa pendekatan social enterprise dapat menjadi strategi efektif dalam memberdayakan UMKM melalui penguatan jaringan, inovasi, dan keberlanjutan usaha. Temuan-temuan tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah sebagai fasilitator dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Utami dan Lestari (2022) mengungkapkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan UMKM sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan efektivitas koordinasi antarinstansi pemerintah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa daerah yang memiliki dukungan infrastruktur memadai cenderung lebih berhasil dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dibandingkan daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses ekonomi. Selain itu, Purba dkk. (2022) menjelaskan bahwa pelaku UMKM di wilayah terpencil masih mengalami berbagai hambatan dalam mengadopsi teknologi digital akibat keterbatasan akses internet dan rendahnya literasi digital. Temuan ini sejalan dengan penelitian Tumija (2022) yang menyatakan bahwa sinergi antara peran pemerintah dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mempertahankan dan meningkatkan keberlangsungan UMKM, terutama pada situasi krisis seperti pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM tidak hanya membutuhkan dukungan modal, tetapi juga kolaborasi berbagai pihak serta peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa peran pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM memiliki kontribusi penting dalam menciptakan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada daerah perkotaan atau wilayah dengan kondisi ekonomi yang relatif berkembang, sehingga kajian mengenai peran Dinas Koperasi dan UKM di wilayah perbatasan seperti Distrik Arso, Kabupaten Keerom masih terbatas. Penelitian Wulandari (2022) juga menegaskan bahwa penguatan legalitas usaha dan pendampingan berkelanjutan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara lebih mendalam peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Keerom dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM, serta mengidentifikasi berbagai hambatan dan strategi yang diterapkan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu. Penelitian Rahmawati (2020) lebih berfokus pada efektivitas program pelatihan dan bantuan modal UMKM di wilayah perkotaan. Penelitian Siregar (2021) menitikberatkan pada strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM melalui pembinaan kelembagaan. Sementara penelitian Utami dan Lestari (2022) mengkaji pengaruh dukungan infrastruktur terhadap keberhasilan pemberdayaan UMKM.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji peran Dinas Koperasi dan UKM di wilayah perbatasan, yaitu Distrik Arso Kabupaten Keerom, dengan menggunakan Institutional Governance Theory sebagai pisau analisis. Kebaruan penelitian ini terletak pada:

- "pengunaan perspektif Institutional Governance Theory'
- "objek penelitin berupa wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi berbeda'
- "analisis terhadap dimensi partisipasi aktor lokal,kepastian kelembagaan,kolaborasimulti pihak,dan keberlanjutan kebijakan'
- "menghasilkan rekomendasi penguatan tatakelola kelembagaan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.'

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Distrik Arso Kabupaten Keerom berdasarkan perspektif Institutional Governance Theory.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode induktif karena bertujuan memahami secara mendalam peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinas KUKM) Kabupaten Keerom dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM di Distrik Arso. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap fenomena sosial, kelembagaan, serta implementasi kebijakan berdasarkan pengalaman dan perspektif para pelaku yang terlibat secara langsung. Data yang dikumpulkan bersifat naratif dan dianalisis secara induktif untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang muncul dari kondisi empiris di lapangan (Creswell, 2014). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi agar diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan program pemberdayaan UMKM. Penelitian dilaksanakan di Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, dengan fokus pada Dinas KUKM Kabupaten Keerom sebagai lembaga yang berwenang dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM. Lokasi ini dipilih karena Distrik Arso merupakan pusat kegiatan ekonomi dan memiliki jumlah pelaku UMKM terbanyak di Kabupaten Keerom. Berdasarkan jadwal penelitian, kegiatan penelitian berlangsung mulai tahap persiapan hingga penyusunan skripsi selama Agustus 2025 sampai Juni 2026.

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling karena informan dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam program pemberdayaan UMKM (Sugiyono, 2018). Informan terdiri atas informan kunci, yaitu Kepala Dinas dan pejabat Dinas KUKM yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan UMKM; informan utama, yaitu pelaku UMKM di Distrik Arso sebagai penerima manfaat program; serta informan pendukung, seperti tokoh masyarakat, pengurus koperasi, lembaga keuangan mikro, dan mitra pendamping UMKM yang memahami kondisi sosial-ekonomi setempat. Jumlah keseluruhan informan sebanyak 10 orang, yang dianggap memadai hingga mencapai kejenuhan data (data saturation) (Guest, Namey, & Chen, 2020). Analisis data dilakukan melalui proses transkripsi, pengkodean, pengelompokan kategori, penentuan tema, dan interpretasi data menggunakan analisis tematik (Braun & Clarke, 2019). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menggunakan triangulasi

sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai informan, serta melakukan member check kepada informan kunci guna memastikan kesesuaian hasil interpretasi dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan (Denzin, 2017; Moleong, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam Menciptakan Iklim Usaha Kondusif Berdasarkan Perspektif Institutional Governance Theory

Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Keerom dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dianalisis menggunakan perspektif Institutional Governance Theory yang dikemukakan oleh Elinor Ostrom. Teori ini menekankan pentingnya tata kelola kelembagaan yang melibatkan partisipasi aktor lokal, kapasitas kelembagaan yang memadai, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta keberlanjutan kebijakan dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini relevan dalam pengembangan UMKM di Distrik Arso yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, sumber daya, dan akses ekonomi. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UKM berperan penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta membangun sinergi antar pihak dalam pengembangan usaha mikro.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Keerom telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan UMKM, seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, fasilitasi bantuan modal, dan pengembangan pemasaran berbasis digital. Program tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi. Menurut Frangky Sahuburua, S.Sos selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM, dinas telah berupaya melaksanakan berbagai program pemberdayaan, namun masih terdapat keterbatasan dalam menjangkau seluruh pelaku usaha secara merata.

Pandangan pelaku usaha menunjukkan bahwa program tersebut cukup membantu, tetapi belum sepenuhnya optimal. Yaroce Felle menyatakan bahwa pelatihan dan bantuan dari dinas cukup membantu, namun belum semua pelaku usaha memperoleh kesempatan yang sama. Angelo Ohee juga menyampaikan bahwa dukungan dari dinas sudah ada, tetapi masih perlu ditingkatkan terutama dalam pendampingan usaha yang berkelanjutan. Sementara itu, Carlos Leson Bhuyaka selaku Kepala Distrik Arso menilai bahwa peran dinas cukup penting, tetapi koordinasi dan pelaksanaan program masih perlu diperkuat agar lebih tepat sasaran. Yakobus Pepuho sebagai pendamping UMKM dari mitra NGO menambahkan bahwa kerja sama pemerintah dan pihak pendamping sudah berjalan, namun perlu ditingkatkan agar dampaknya lebih luas.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Keerom dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif telah berjalan, namun masih menghadapi berbagai keterbatasan. Partisipasi pelaku usaha, kapasitas kelembagaan, kolaborasi antar pihak, serta keberlanjutan kebijakan menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas program pemberdayaan UMKM. Berdasarkan perspektif Institutional Governance Theory, penciptaan iklim usaha yang kondusif memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, dukungan kelembagaan yang kuat, serta kebijakan yang berkelanjutan. Dengan demikian, Dinas Koperasi dan UKM berperan sebagai fasilitator dan penggerak ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Distrik Arso secara berkelanjutan.

3.1.1 Partisipasi Aktor Lokal

Partisipasi aktor lokal menggambarkan keterlibatan pelaku UMKM dalam kegiatan pembinaan, pelatihan, serta proses perencanaan dan evaluasi program pemberdayaan. Tingkat partisipasi menjadi indikator penting untuk menilai apakah pendekatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Keerom

sudah bersifat partisipatif atau masih didominasi pola top-down. Keterlibatan pelaku UMKM telah dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan pembinaan yang bertujuan meningkatkan kapasitas manajerial, produksi, dan pemasaran. Namun, partisipasi tersebut masih terbatas pada kelompok tertentu yang memiliki akses informasi dan kedekatan dengan pusat kegiatan. Frangky Sahuburua, S.Sos menyatakan bahwa pelaku UMKM telah dilibatkan dalam berbagai kegiatan pelatihan, namun belum semua pelaku usaha dapat terjangkau karena keterbatasan anggaran dan luas wilayah binaan. Yaroce Felle juga menyampaikan bahwa pelatihan cukup membantu, tetapi tidak semua pelaku usaha memperoleh informasi dan kesempatan yang sama. Angelo Ohee menambahkan bahwa kegiatan pelatihan sudah ada, namun belum merata dan belum dilakukan secara rutin.

Keterlibatan pelaku UMKM dalam proses perencanaan dan evaluasi program masih tergolong rendah. Proses perencanaan program lebih banyak dilakukan oleh pihak dinas tanpa melibatkan pelaku usaha secara langsung. Carlos Leson Bhuyaka menyatakan bahwa pelaku UMKM belum banyak dilibatkan dalam perencanaan program sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai kebutuhan lapangan. Yakobus Pepuho juga menilai bahwa pendekatan pemberdayaan masih didominasi pemerintah, sementara ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi masih terbatas.

Tabel 1.
Partisipasi Pelaku UMKM dalam Program Pemberdayaan di Distrik Arso

No	Indikator Partisipasi	Kondisi Lapangan	Keterangan
1	Keterlibatan dalam pelatihan	Cukup ada	Diikuti sebagian pelaku UMKM
2	Keterlibatan dalam pembinaan	Terbatas	Belum merata di seluruh wilayah
3	Keterlibatan dalam perencanaan program	Rendah	Didominasi oleh pihak dinas
4	Keterlibatan dalam evaluasi program	Rendah	Belum melibatkan pelaku UMKM secara aktif

Sumber: Hasil pengelolahan data riset 2026

Berdasarkan Tabel 1. partisipasi pelaku UMKM dalam kegiatan pelatihan dan pembinaan telah berjalan, namun belum merata. Keterlibatan dalam perencanaan dan evaluasi program masih berada pada tingkat rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan UMKM masih cenderung bersifat top-down. Analisis dimensi partisipasi aktor lokal menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Keerom telah membuka ruang partisipasi bagi pelaku UMKM, tetapi belum optimal dalam melibatkan masyarakat secara aktif pada seluruh tahapan program. Tingkat partisipasi yang belum merata menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas program pemberdayaan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

3.1.2 Kapasitas Kelembagaan

Kapasitas kelembagaan menggambarkan kemampuan internal Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Keerom dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pemberdayaan UMKM. Penilaian kapasitas kelembagaan mencakup kompetensi aparatur, ketersediaan sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Kompetensi aparatur menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas pelaksanaan program. Aparatur dinas telah memiliki pemahaman dasar mengenai pemberdayaan UMKM, namun kompetensi teknis masih perlu ditingkatkan terutama dalam pendampingan usaha berbasis kebutuhan spesifik pelaku UMKM.

Frangky Sahuburua, S.Sos menyatakan bahwa aparatur dinas telah melaksanakan tugas pembinaan sesuai program yang ada, namun peningkatan kompetensi masih diperlukan agar pendampingan lebih efektif. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah aparatur masih terbatas

dibandingkan luas wilayah binaan dan jumlah pelaku UMKM. Angelo Ohee menyampaikan bahwa pendampingan belum dilakukan secara rutin karena keterbatasan petugas lapangan.

Dukungan anggaran juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Keterbatasan anggaran membatasi jumlah kegiatan dan jangkauan program terhadap pelaku UMKM. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung seperti fasilitas pelatihan, media pembelajaran, dan akses teknologi masih belum memadai di beberapa wilayah. Menurut Yaroce Felle, fasilitas pelatihan masih terbatas dan belum semua pelaku usaha dapat mengakses sarana yang dibutuhkan.

Tabel 2.
Kapasitas Kelembagaan Dinas KUKM Kabupaten Keerom

No	Indikator Kapasitas	Kondisi Lapangan	Keterangan
1	Kompetensi aparatur	Cukup memadai	Perlu peningkatan keterampilan teknis
2	Ketersediaan SDM	Terbatas	Jumlah aparatur belum sebanding dengan wilayah binaan
3	Dukungan anggaran	Terbatas	Membatasi pelaksanaan program secara menyeluruh
4	Sarana dan prasarana	Kurang memadai	Fasilitas pelatihan dan teknologi belum optimal

Sumber: Hasil pengelolahan data riset 2026

Berdasarkan Tabel 2. kapasitas kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Keerom berada pada kategori cukup, namun belum optimal. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan UMKM. Analisis dimensi kapasitas kelembagaan menunjukkan bahwa kemampuan internal organisasi belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan program secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penambahan sumber daya manusia, serta optimalisasi dukungan anggaran dan fasilitas guna menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM.

3.1.3 Kolaborasi Multi Stakeholder

Kolaborasi multi stakeholder mencerminkan tingkat kerja sama antara Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Keerom dengan berbagai pihak dalam mendukung pengembangan UMKM. Kolaborasi ini melibatkan lembaga keuangan, sektor swasta, pemerintah daerah, serta organisasi nonpemerintah. Tujuannya adalah memperluas akses permodalan, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, dan memperkuat jaringan pemasaran produk UMKM. Kerja sama dengan lembaga keuangan telah dilakukan melalui program bantuan modal dan fasilitasi pembiayaan, namun belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku usaha. Akses terhadap lembaga keuangan formal masih terbatas, terutama bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki kelengkapan administrasi usaha. Frangky Sahuburua, S.Sos menyatakan bahwa kerja sama dengan lembaga keuangan sudah dilakukan melalui program bantuan dan fasilitasi pembiayaan, tetapi belum semua pelaku UMKM dapat mengaksesnya.

Dari sisi pelaku usaha, Angelo Ohee menyampaikan bahwa akses ke lembaga keuangan masih sulit karena persyaratan yang harus dipenuhi cukup banyak. Kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi nonpemerintah juga telah dilakukan dalam bentuk pendampingan dan pelatihan usaha, namun integrasi program antar pihak masih belum optimal sehingga dampak yang dihasilkan belum maksimal. Yakobus Pepuho menyatakan bahwa kerja sama antara pemerintah dan mitra pendamping sudah ada, tetapi belum terkoordinasi secara menyeluruh dalam satu sistem program yang terintegrasi. Sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan efektivitas kebijakan pemberdayaan UMKM. Program Dinas KUKM telah mengacu pada kebijakan

nasional, namun implementasinya masih belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi lokal. Carlos Leson Bhuyaka menyatakan bahwa program dari pemerintah pusat sudah ada, tetapi penyesuaian dengan kondisi daerah masih perlu diperkuat agar lebih tepat sasaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi pemerintah masih memerlukan peningkatan, terutama dalam penyelarasan kebijakan dan pelaksanaan program di tingkat lokal.

Tabel 3.

Kolaborasi Multi Stakeholder dalam Pemberdayaan UMKM di Distrik Arso

No	Indikator Kolaborasi	Kondisi Lapangan	Keterangan
1	Kerja sama dengan lembaga keuangan	Ada namun terbatas	Akses pembiayaan belum merata
2	Kerja sama dengan sektor swasta/NGO	Cukup ada	Belum terintegrasi secara menyeluruh
3	Sinkronisasi program pusat-daerah	Belum optimal	Perlu penyesuaian dengan kondisi lokal
4	Koordinasi antarinstansi	Terbatas	Sinergi program belum maksimal

Sumber: Hasil pengelolahan data riset 2026

Berdasarkan Tabel 3. kolaborasi multi stakeholder telah dilakukan, namun masih belum optimal. Keterbatasan akses pembiayaan, kurangnya integrasi program, serta lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas kerja sama. Analisis berdasarkan dimensi kolaborasi multi stakeholder menunjukkan bahwa kekuatan kolaborasi masih tergolong lemah. Kondisi tersebut ditandai dengan belum optimalnya sinergi antar pihak serta belum terbangunnya sistem kerja sama yang terintegrasi. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM di Distrik Arso.

3.1.4 Keberlanjutan Kebijakan

Keberlanjutan kebijakan mencerminkan konsistensi pelaksanaan program pemberdayaan UMKM dari waktu ke waktu serta kemampuan kebijakan dalam menghasilkan dampak jangka panjang terhadap kemandirian pelaku usaha. Aspek ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Keerom dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di Distrik Arso menunjukkan adanya kesinambungan kegiatan dari tahun ke tahun. Program seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan modal produktif, pendampingan usaha, serta digitalisasi pemasaran terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi masyarakat. Namun, konsistensi pelaksanaan program belum sepenuhnya diikuti dengan keberlanjutan hasil yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Frangky Sahuburua, S.Sos menyatakan bahwa program pemberdayaan dilaksanakan setiap tahun, namun keberlanjutan hasil masih bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya secara mandiri.

Dampak kebijakan terhadap pelaku UMKM menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan, terutama dalam aspek pengelolaan usaha dan pemasaran. Akan tetapi, dampak tersebut belum mampu meningkatkan skala usaha secara signifikan. Yaroce Felle menyampaikan bahwa pelatihan yang diberikan cukup membantu dalam menambah pengetahuan, tetapi belum banyak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha. Angelo Ohee juga menyatakan bahwa program bantuan dan pelatihan sudah ada, namun belum memberikan dampak yang berkelanjutan karena tidak diikuti dengan pendampingan jangka panjang.

Keterbatasan pendampingan lanjutan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberlanjutan kebijakan. Program yang bersifat sementara tanpa monitoring berkelanjutan menyebabkan pelaku usaha kesulitan mengembangkan usaha secara konsisten. Carlos Leson Bhuyaka

menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah baik, tetapi perlu adanya pendampingan berkelanjutan agar hasilnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Yakobus Pepuho juga menyampaikan bahwa keberlanjutan program masih menjadi tantangan karena belum adanya sistem pendampingan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Tabel 4.
Keberlanjutan Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Distrik Arso

Indikator Keberlanjutan	Kondisi Lapangan	Keterangan
Konsistensi pelaksanaan program	Berjalan setiap tahun	Program rutin dilaksanakan
Pendampingan berkelanjutan	Terbatas	Belum dilakukan secara kontinu
Dampak terhadap peningkatan usaha	Kurang signifikan	Belum meningkatkan skala usaha secara optimal
Kemandirian pelaku UMKM	Belum optimal	Masih bergantung pada bantuan pemerintah

Sumber: Hasil pengelolahan data riset 2026

Berdasarkan Tabel 4. pelaksanaan program pemberdayaan telah dilakukan secara konsisten, namun keberlanjutan dampak masih belum optimal. Keterbatasan pendampingan lanjutan serta belum adanya sistem monitoring yang berkelanjutan menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Analisis berdasarkan dimensi keberlanjutan kebijakan menunjukkan bahwa program pemberdayaan UMKM masih cenderung menghasilkan dampak jangka pendek. Keberhasilan program lebih terlihat pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sementara peningkatan kemandirian dan daya saing usaha belum tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan melalui pendampingan jangka panjang, evaluasi berkelanjutan, serta integrasi program yang lebih sistematis.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Keerom telah berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM di Distrik Arso melalui program pelatihan, pendampingan usaha, fasilitasi akses permodalan, dan penguatan kapasitas pelaku usaha. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih belum optimal karena partisipasi pelaku UMKM yang terbatas, kapasitas kelembagaan yang belum memadai, kolaborasi antar pemangku kepentingan yang masih lemah, serta keberlanjutan program yang belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing usaha.

Sama halnya dengan temuan Rahmawati (2020), penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya bahwa keberhasilan pemberdayaan UMKM memerlukan dukungan pemerintah melalui pembinaan yang berkelanjutan. Selain itu, temuan penelitian ini juga sejalan dengan Siregar (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan UMKM dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi tersebut masih belum berjalan optimal sehingga akses permodalan, pendampingan, dan pengembangan pasar belum dapat menjangkau seluruh pelaku UMKM secara merata.

Di sisi lain, temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian Utami dan Lestari (2022) yang menemukan bahwa program pemberdayaan UMKM lebih efektif pada daerah yang memiliki dukungan infrastruktur dan akses ekonomi yang memadai. Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi Distrik Arso sebagai wilayah perbatasan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan efektivitas program belum optimal. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan peran Dinas Koperasi dan UKM tidak hanya ditentukan oleh jumlah program yang dilaksanakan, tetapi juga oleh kemampuan kelembagaan dalam membangun pendampingan berkelanjutan, memperkuat kolaborasi multipihak, serta menyesuaikan strategi pemberdayaan dengan karakteristik wilayah perbatasan. Temuan ini sekaligus memperluas hasil penelitian sebelumnya karena menunjukkan bahwa pengembangan UMKM di wilayah perbatasan memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan terintegrasi

Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui perspektif Institutional Governance Theory yang menekankan pentingnya tata kelola kelembagaan yang partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Rendahnya tingkat partisipasi pelaku UMKM dalam perencanaan dan evaluasi program menunjukkan bahwa proses pemberdayaan belum sepenuhnya menerapkan prinsip partisipatif. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung mengindikasikan bahwa kapasitas kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM masih perlu diperkuat agar mampu menjalankan fungsi pembinaan secara lebih efektif. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penciptaan iklim usaha yang kondusif tidak hanya bergantung pada pelaksanaan program, tetapi juga pada kualitas tata kelola kelembagaan yang mampu membangun sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan pihak pendamping secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan peningkatan kolaborasi multipihak menjadi prasyarat penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang berdaya saing dan berkelanjutan di Distrik Arso.

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan temuan bahwa pertumbuhan UMKM di Distrik Arso tidak hanya dipengaruhi oleh program pembinaan dan bantuan yang diberikan Dinas Koperasi dan UKM, tetapi juga oleh faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari kondisi wilayah. Faktor pendukung utama meliputi potensi sumber daya alam yang besar, tingginya jumlah penduduk usia produktif, serta adanya program pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi permodalan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah. Namun demikian, masih terdapat faktor penghambat berupa keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi digital pelaku usaha, belum meratanya jangkauan program pemberdayaan, keterbatasan akses internet, serta kondisi infrastruktur jalan dan sarana pemasaran yang belum memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan UMKM memerlukan sinergi antara penguatan kapasitas pelaku usaha, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan agar iklim usaha yang kondusif dapat terwujud secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Keerom telah menjalankan perannya dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM di Distrik Arso melalui pelaksanaan program pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, fasilitasi akses permodalan, dan digitalisasi pemasaran, namun peran tersebut belum optimal karena masih rendahnya partisipasi pelaku UMKM, terbatasnya kapasitas kelembagaan, belum maksimalnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta lemahnya keberlanjutan program, sehingga implementasi

program pemberdayaan dan strategi pengembangan UMKM belum memberikan dampak yang merata dan optimal terhadap peningkatan daya saing serta pertumbuhan UMKM di Distrik Arso.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya berfokus di Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada wilayah lain. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bergantung pada data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga dipengaruhi oleh persepsi informan.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan pada wilayah atau distrik lain di Kabupaten Keerom maupun daerah perbatasan lainnya dengan menggunakan pendekatan yang lebih luas, baik kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas program pembinaan, akses permodalan, digitalisasi usaha, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan daya saing UMKM secara berkelanjutan

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Keerom beserta jajaran, Pemerintah Distrik Arso, para pelaku UMKM, serta seluruh pihak yang telah memberikan izin, bantuan, data, dan dukungan selama pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang diberikan mendapat balasan yang baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Keerom. (2023). Kabupaten Keerom dalam Angka 2023. https://papua.bps.go.id/publication.html

BPS. (2023–2024). Seri PDRB Kabupaten Keerom menurut Lapangan Usaha (harga konstan). https://papua.bps.go.id/indicator.html

Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 11(4), 589–597. https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). SAGE Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-design/book246125

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2017). The SAGE Handbook of Qualitative Research (5th ed.). SAGE Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/the-sage-handbook-of-qualitative-research/book242504

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Keerom. (2024). Laporan Program Strategis 2022–2024 dan Data UMKM Distrik Arso.

Gibb, A., & Li, J. (2003). Organizing for enterprise in China: What can we learn from the Chinese micro, small, and medium enterprise development experience. Futures, 35(4), 403–421. https://doi.org/10.1016/S0016-3287(02)00089-7

Guest, G., Namey, E., & Chen, M. (2020). A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research. Field Methods, 32(1), 59–82. https://doi.org/10.1177/1525822X19896790

Hatta, M. (2015). Demokrasi Kita (cetak ulang/kompilasi). Kompas/LP3ES. https://scholar.google.com/scholar?q=Mohammad+Hatta+2015+Demokrasi+Kita

Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2020). Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis KemenkopUKM 2020–2024.

https://jdih.kemenkopukm.go.id/peraturan/permennkopukm-nomor-6-tahun-2020-tentang-renstra-2020-2024

Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). UMKM tulang punggung perekonomian (statistik 65,4 juta; 61,97% PDB; ~97% tenaga kerja). https://kemenkopukm.go.id/read/umkm-tulang-punggung-perekonomian

Maksum, I. R., Rachdyu, A. Y. S., & Kusumawardhani, D. (2020). A social enterprise approach to empowering micro, small and medium enterprises (SMEs) in Indonesia. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 6(3), Article 50. https://doi.org/10.3390/joitmc6030050

Marthalina, M. (2018). Pemberdayaan perempuan dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan (JPDPP). https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/862

Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (ed. revisi). Remaja Rosdakarya. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1194585

Ndraha, T. (2018). Ilmu Pemerintahan (ed. mutakhir). Kencana/Refika Aditama. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1168422

Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763

Purba, D. S. (2021). Manajemen Usaha Kecil dan Menengah (buku ajar terbuka). https://repository.stiesultanagung.ac.id/id/eprint/522/1/17.%20FullBook%20Manajemen%20Usaha%20Kecil%20dan%20Menengah.pdf

Rahmawati, S. T. (2020). Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta. Economics and Digital Business Review, 6(2), 1349–1362. https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/2473

Siregar, R. (2021). Strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM di Kota Medan. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 9(1), 1–12. https://scholar.google.com/scholar?q=Siregar+2021+Strategi+Pemerintah+Daerah+UMKM+Medan

Sitompul, N. M. (2023). Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Jambi Provinsi Jambi. Jurnal Registratie IPDN. https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/3710

Tambunan, T. T. H. (2019). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting. LP3ES/Universitas Trisakti. https://scholar.google.com/scholar?q=Tambunan+2019+UMKM

Toyo, T. R., Nazwin, A. H., & Setiawan, M. R. (2024). Peran pemerintah daerah Kota Mataram dalam mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 14(2), 187–194. https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/4625

Tumija. (2022). Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada masa pandemi COVID-19 di Cipageran, Cimahi. Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment, 2(2). https://ejournal.ipdn.ac.id/cc/article/view/2328

Utami, N., & Lestari, D. (2022). Analisis kebijakan pemerintah daerah terhadap penguatan kapasitas UMKM di Kabupaten Sleman. Jurnal Kebijakan Publik, 14(2), 85–98. https://scholar.google.com/scholar?q=Utami+Lestari+2022+UMKM+Sleman

Wulandari, S. (2022). Penguatan dan pendampingan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) produktif melalui legalitas usaha dan pengembangan kapasitas usaha. Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment. https://ejournal.ipdn.ac.id/cc/article/download/2725/1507

Zhang, Y., Dong, X., Wang, Y., & Li, H. (2025). Research on the theoretical logic and mechanism of digital inclusive finance in promoting the high-quality development of small and medium-sized enterprises. International Review of Economics & Finance, 101, 104202. https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104202

Zhang, Y., Jin, X., & Li, H. (2025). The impact of digital financial inclusion on the high-quality development of small- and medium-sized enterprises—Evidence from China. International Review of Financial Analysis, 102, 104074. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2025.104074

Zhang, Y., Mi, X., Li, H., & Wang, X. (2025). Evolutionary game analysis of digital inclusive finance for high-quality development of small and medium-sized enterprises. International Review of Financial Analysis, 105, 104388. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2025.104388